

**Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Investasi, PDRB
Riil dan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Nadiah Vitha Julfira

Nomor Mahasiswa : 17313027

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2021

**Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Investasi, PDRB
Riil dan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata-1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nadiah Vitha Julfira

Nomor Mahasiswa : 17313027

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis, diacu dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Penulis,



Nadiyah Vitha Julfira

PENGESAHAN

ANALISIS ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA
BERDASARKAN INVESTASI, PDRB RIIL DAN UMK DI PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2015-2019

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Nadiah Vitha Julfira

Nomor Mahasiswa : 17313027

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 17 Desember, 2020

Dosen Pembimbing,



(Rokhedi Priyo Santoso,,S.E., MIDEc.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS ELASTISITAS PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN INVESTASI,
PDRB RIIL DAN UMK DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015-2019

Disusun Oleh : NADIAH VITHA JULFIRA
Nomor Mahasiswa : 17313027

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Rabu, 17 Februari 2021**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Rokhedi Priyo Santoso,,S.E., MIDEc.

Penguji : Jaka Sriyana,Prof.,S.E.,M.Si., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Dan Tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah”

(QS. Huud : 88)

“Jika kita bertemu rintangan, yang harus kita lakukan adalah melintasinya.

Rintangan itu akan berubah menjadi jembatan.”

(Song Sam Dong)

“All is well, all is well. Though everything is a mess, all is well.”

(Anthony De Mello)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada hamba-hambanya. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam karena telah menuntun umatnya dari jaman jahiliyah ke jaman yang terang benderang saat ini. Dengan rasa syukur dan nikmat yang sebesar-sebesarnya, Skripsi ini penulis dedikasikan untuk :

1. Allah S.W.T dan Nabi Muhammad S.A.W karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua Orang Tua, yang telah mendoakan penulis tiada henti dan memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
3. Adikku, Yahya Vitho Setiadi dan sepupu-sepuou tercinta yang selalu mengayomi, memberikan keseruan, semangat, serta motivasi kepada penulis.
4. Teman-teman Penulis, Annisa Ayu, Heni, Annisa Rinda Syahputri, Safira Madani dan Halimatussa'diyah yang senantiasa mengingatkan kebaikan dan membantu penulis tanpa pamrih.
5. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2017, khususnya Reyna Surya Maulidina, Nuryana Nurul, dan Evania Friza Azhar yang telah saling mendukung selama masa perkuliahan.
6. Semua kerabat yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu, yang telah memberikan semangat dan membantu penulis selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jaman kegelapan hingga menuju jaman yang terang benderang.

Skripsi yang berjudul **Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Investasi, PDRB Riil dan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019** merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya hambatan tersebut dapat teratasi. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua saya, yang telah mendoakan dan memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.
2. Bapak Rokhedi Priyo Santoso, S.E., MIDEc selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan, ilmu yang bermanfaat serta memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
3. Bapak Fathul Wahid, Prof., ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Jaka Sriyana, Prof., S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Seluruh Bapak-Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, khususnya Program Studi Ekonomi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat

7. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAKSI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Kajian Pustaka.....	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1. Tenaga Kerja.....	10
2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja.....	11

2.2.3 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja.....	13
2.2.4 Investasi (Penanaman Modal).....	14
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto	17
2.2.6 Upah.....	19
2.3 Hipotesis Penelitian	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	25
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	26
3.3 Metode Analisis	27
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	32
4.2 Hasil dan Analisis	35
4.2.1 Pemilihan Model.....	35
4.2.2 Model Regresi Panel Random Effect.....	37
4.2.3 Pengujian Hipotesis.....	38
4.3 Pembahasan.....	41
4.3.1 Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	41
4.3.2 Analisis Pengaruh PDRB Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	41
4.3.3 Analisis Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Implikasi	43
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 UMP Jawa Barat (Rupiah).....	2
Grafik 1.2 Laju PDRB Jawa Barat (Persen)	2
Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Jawa Barat (Jiwa)	3
Grafik 1.4 Kondisi T.K Jawa Barat (Jiwa).....	4
Grafik 1.5 TPT Indonesia dan Jawa Barat (Persen).....	5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja..... 13



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	32
Tabel 4.2 Uji Chow	35
Tabel 4.3 Uji Hausman	36
Tabel 4.4 Uji LM	36
Tabel 4.5 Model Random Effect	37
Tabel 4.6 Uji F	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	49
Lampiran 2 Olah Data Eviews	53
Lampiran 3 Uji Panel	55



ABSTRAKSI

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi permasalahan di negara-negara berkembang. Untuk itu, guna menciptakan pembangunan ekonomi yang baik diperlukan penyerapan tenaga kerja yang merata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Investasi, PDRB Riil dan Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi dalam pengumpulan datanya, sementara analisis kuantitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier berganda dengan metode *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan jika Investasi memiliki hubungan yang positif tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. PDRB Riil memiliki pengaruh positif signifikan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Sementara itu UMK memiliki hubungan negatif signifikan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Kata Kunci : Penyerapan Tenaga Kerja, Investasi, PDRB, Upah Minimum.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

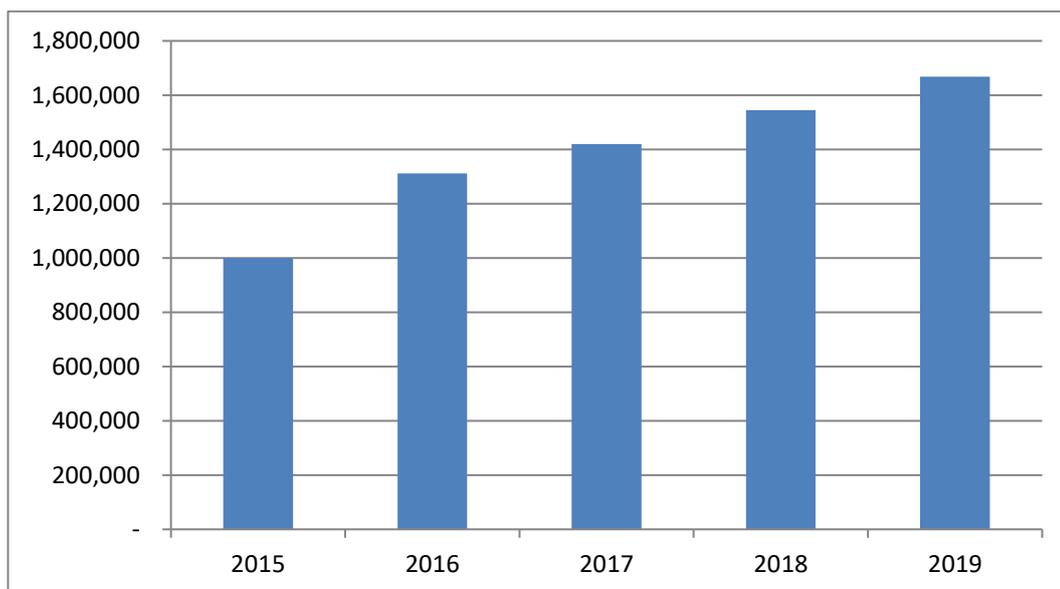
Penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di suatu wilayah guna menciptakan pembangunan ekonomi yang merata. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur ekonomi dan perubahan sosial, seperti pengurangan kemiskinan, disparitas dan pengangguran (Todaro & Smith, 2014). Sampai saat ini, pengangguran masih menjadi permasalahan utama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terdapat beberapa pemicu terjadinya lonjakan angka pengangguran, diantaranya adalah sempitnya lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh langkanya faktor modal baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi, dan juga Upah Minimum Regional.

Perekonomian yang maju tidak dapat menjadi jaminan daerah tersebut dikatakan sejahtera jika tidak terdapat perluasan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan lapangan kerja karena tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain dipengaruhi oleh faktor lain seperti modal, alam dan teknologi. Menurut hukum Okun, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang negatif. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengangguran menurun. Dalam kata lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Terdapat beberapa faktor penting yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah, diantaranya adalah Investasi, PDRB Riil dan UMR. Investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri memengaruhi penyerapan tenaga kerja karena berhubungan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Untuk realisasi Investasi, Jawa Barat selalu menempati posisi tiga besar nasional bersama dengan DKI Jakarta dan Jawa Timur. Realisasi investasi

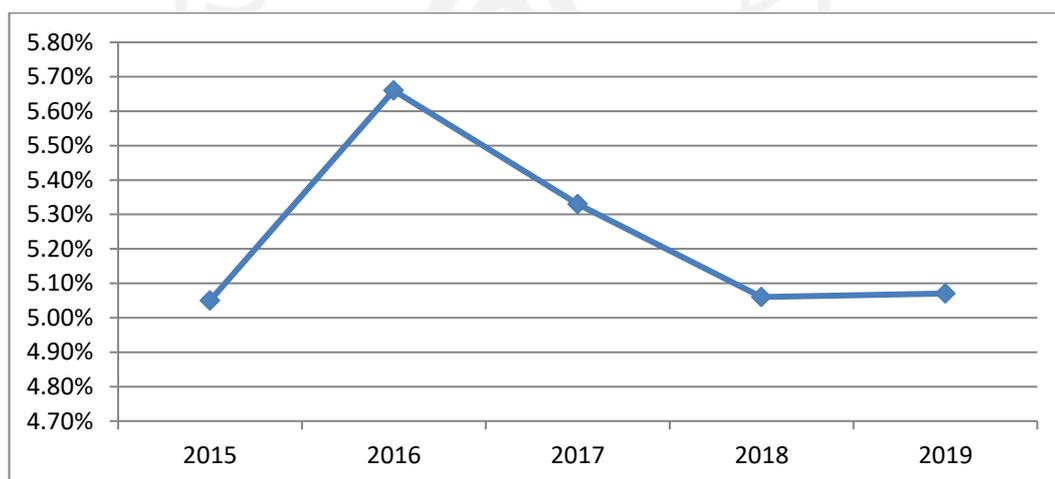
Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dan 2019 tercatat menduduki peringkat pertama nasional dengan nilai investasi masing-masing sebesar 116,9 Triliun Rupiah dan 137,5 Triliun Rupiah (Diskominfo Jawa Barat, 2020).

Grafik 1.1 UMP Jawa Barat (Rupiah)



Sumber : Biro Hukum dan Ham Jawa Barat, 2019

Grafik 1.2 Laju PDRB Jawa Barat (Persen)



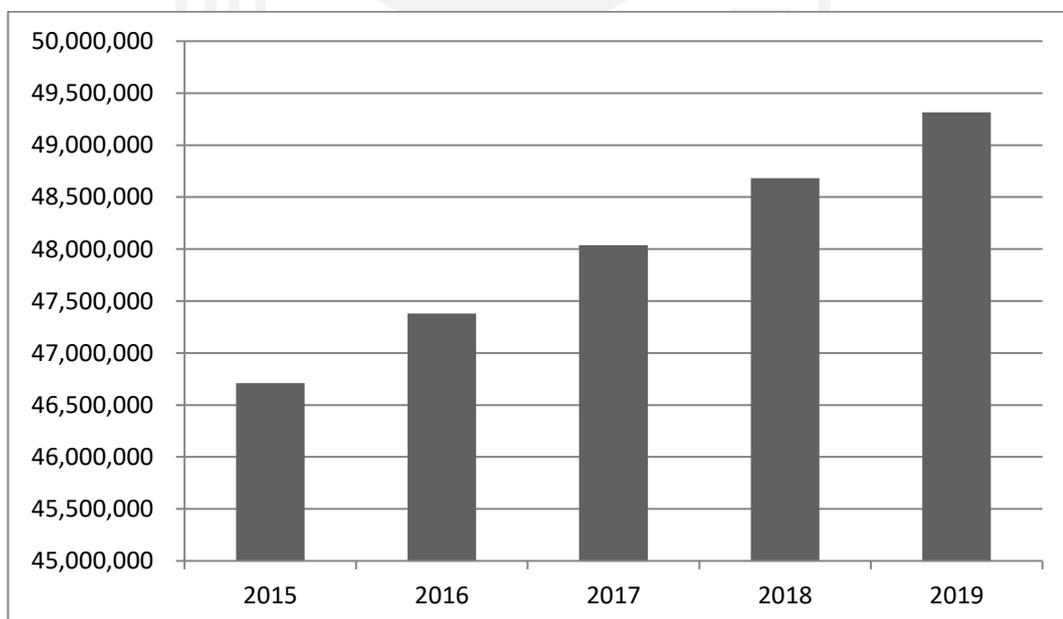
Sumber : BPS, 2020

PDRB Riil berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja karena tenaga kerja merupakan salah satu fungsi produksi. Sementara itu, UMR memengaruhi

penyerapan tenaga kerja karena berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu wilayah. Di Jawa Barat, Upah Minimum terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan Grafik 1.1, UMP Jawa Barat pada tahun 2015 sebesar 1.000.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi sebesar 1.668.000. Laju PDRB di Provinsi Jawa Barat cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, laju PDRB sebesar 5,05%. Di tahun 2016, laju PDRB mengalami kenaikan menjadi 5,66%. Kemudian pada tahun 2017 hingga 2018 laju PDRB mengalami penurunan masing-masing menjadi 5,33% dan 5,06%. Sementara itu, pada tahun 2019 laju PDRB mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yakni menjadi 5,07%.

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan manusianya, namun jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaannya cukup tinggi.

Grafik 1.3 Jumlah Penduduk Jawa Barat (Jiwa)

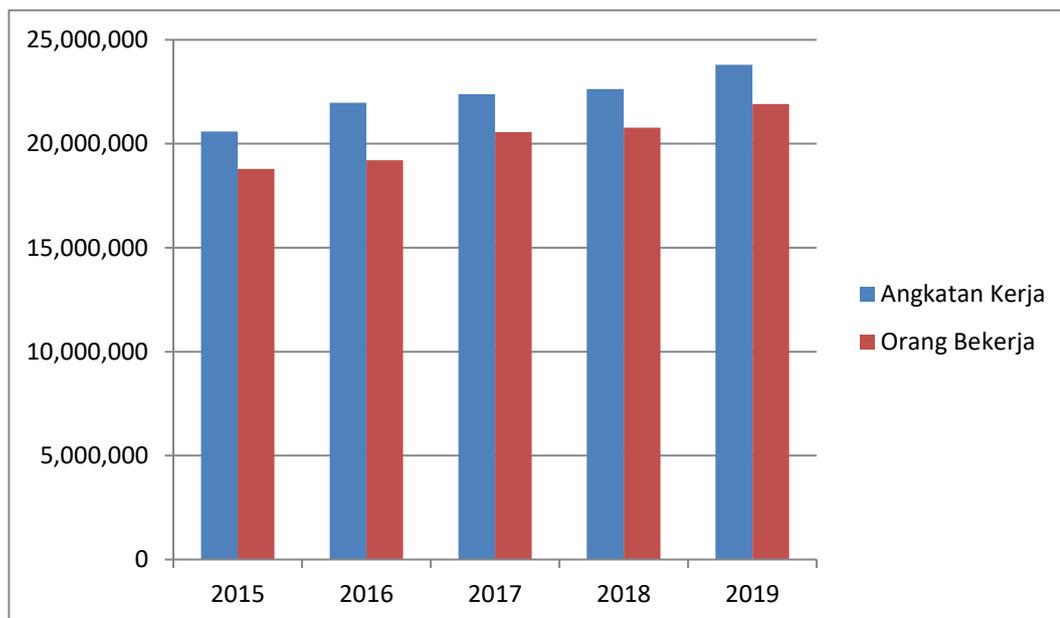


Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, tercatat pada tahun 2015 jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 46.709.569 jiwa, sementara pada tahun 2019 terjadi peningkatan penduduk menjadi sebesar

49.316.712 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah penduduk Jawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat juga diikuti dengan tingginya jumlah angkatan kerja.

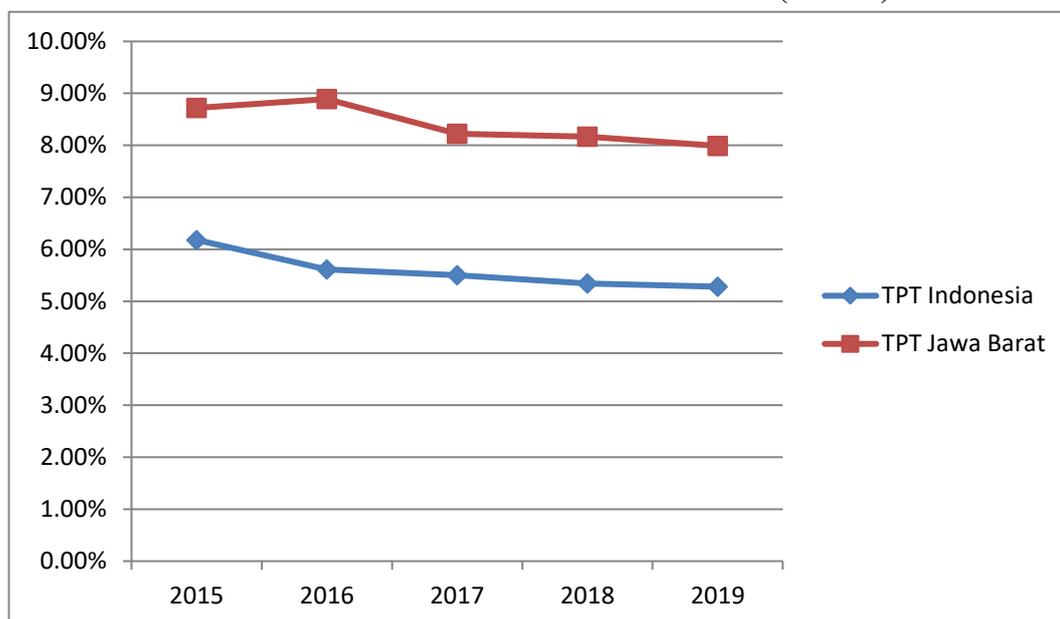
Grafik 1.4 Kondisi T.K Jawa Barat (Jiwa)



Sumber : BPS, 2019

Penduduk angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran (BPS, 2019). Jika merujuk pada Grafik 1.4, jumlah orang yang bekerja di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, jumlah orang bekerja sebesar 18.791.482 Kemudian jumlah tersebut naik kembali di tahun 2016 menjadi sebesar 19.202.038 jiwa dan kenaikan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2019, menjadi sebanyak 21.902.958 jiwa.

Grafik 1.5 TPT Indonesia dan Jawa Barat (Persen)



Sumber : BPS, 2020

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 lebih rendah jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan Grafik 1.4, TPT Jawa Barat pada tahun 2015 tercatat sebesar 8,72%. Di tahun 2016, TPT mengalami kenaikan, yakni menjadi 8,89%. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, TPT mengalami penurunan sehingga angka TPT masing-masing sebesar 8,22% dan 8,17%. Tahun 2019 TPT Jawa Barat tercatat sebesar 7,99%. Angka tersebut merupakan yang terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Data tersebut menunjukkan jika TPT di Provinsi Jawa Barat berfluktuatif. Meski pada tahun 2019 TPT Jawa Barat cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun TPT di Provinsi Jawa Barat masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT nasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat jika dilihat berdasarkan Investasi, PDRB Riil dan UMR. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat

judul “*Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Investasi, PDRB Riil, dan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Investasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh PDRB Riil secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh UMK secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah Investasi, PDRB Riil dan UMK berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?
5. Berdasarkan Investasi, PDRB Riil dan UMK, bagaimanakah tingkat elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui atau menganalisis secara parsial pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui atau menganalisis secara parsial pengaruh PDRB Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui atau menganalisis secara parsial pengaruh UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui atau menganalisis secara simultan pengaruh Investasi, PDRB Riil dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui atau menganalisis tingkat elastisitas Investasi, PDRB Riil dan UMR terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi, yakni untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, menambah pemahaman mengenai ilmu yang telah dipelajari serta membantu mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat bagi praktisi, yakni hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk mengamati faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang diharapkan bisa memperluas wawasan dan bukti empiris mengenai pengaruh Investasi, PDRB Riil dan UMK.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian serta Manfaat Penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Dalam bab ini akan dibahas Kajian Pustaka, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, Hubungan antar Variabel serta Hipotesis Penelitian.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel dan Metode Analisis Data.

Bab IV. Hasil Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Analisis Statistik Deskriptif, Hasil Analisis dan Pembahasan.

Bab V. Penutup

Bab ini membahas Kesimpulan dan Implikasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam bab ini berisi dokumentasi dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan bagi penulis adalah sebagai berikut :

Hizbullah, (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2011-2015. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel dan menggunakan 5 variabel, yakni tenaga kerja sebagai variabel dependennya serta IPM, Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan PDRB sebagai variabel independennya. Hasil penelitian menunjukkan jika IPM memiliki pengaruh yang negatif sedangkan PDRB tidak memiliki pengaruh dan berhubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Angkatan Kerja dan Upah Minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Sari, (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode regresi data panel dengan metode Random Effect Model (REM). Penelitian ini menggunakan 6 variabel, yakni Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel independen serta Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Industri, Upah Minimum, PDRB dan Kunjungan Wisatawan sebagai variabel independennya. Hasil penelitian menunjukkan jika pertumbuhan penduduk, PDRB, upah minimum dan kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat, sementara jumlah industri memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

Pangastuti, (2015) melakukan penelitian terkait Faktor-Faktor yang memengaruhi Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, sementara analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *Random Effect Model* (REM). Penelitian ini menggunakan empat variabel independen, yakni PDRB, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 1 variabel dependen, yakni Jumlah Orang Bekerja. Hasil penelitian menunjukkan jika PDRB memiliki hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara UMK, Pengangguran dan Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.

Feriyanto & Sriyana (2016) melakukan penelitian tentang *Labor Absorption Under Minimum Wage of Policy In Indonesia*. Penelitian ini menggunakan data panel provinsi pada periode 2006 sampai 2013 di mana Upah Minimum, Investasi Domestik, Investasi Asing serta Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independennya dan Jumlah Orang yang Bekerja sebagai variabel dependennya. Hasil penelitian menunjukkan jika kebijakan upah minimum menciptakan jebakan pengangguran pada periode tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lintas provinsi juga belum berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja dalam ekonomi lokal. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penyerapan tenaga kerja provinsi cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor geografis.

Wihastuti & Rahmatullah, (2018) melakukan penelitian tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel dengan 6 provinsi di Pulau Jawa selama periode 2011-2016 dengan menggunakan model *fixed effect*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMP dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen serta Jumlah Orang Bekerja sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan jika UMP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa, sementara Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Hayyu, (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta dengan pengujian menggunakan Regresi Berganda. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode runtut waktu (*time series*), yakni dari tahun 2000-2014, di mana PDRB, Investasi dan UMK sebagai variabel Independen dan Jumlah Orang Bekerja sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah memiliki korelasi negatif yang signifikan dan tidak elastis dengan penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta, sementara itu terdapat korelasi positif yang signifikan dan elastis antara PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan Investasi memiliki korelasi negatif yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, dalam penelitian ini penulis merujuk pada penelitian Pangastuti (2015) yang membahas tentang Faktor-Faktor yang memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian tersebut, Pangastuti menggunakan nilai PDRB, Upah Minimum, Pengangguran dan PAD sebagai variabel independen dan Jumlah Orang Bekerja sebagai variabel dependennya. Sementara yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan Investasi, Pertumbuhan PDRB dan Upah Minimum sebagai variabel independen nya, lokasi penelitian yang berbeda yakni Jawa Barat, serta periode waktu yang diteliti.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting selain kapital. Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat 2, tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja atau dikenal juga penduduk usia kerja dibagi menjadi dua bagian, yakni angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

2.2.1.1 Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi untuk sementara waktu menganggur dan tidak bekerja. Sementara itu, Bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang setidaknya selama satu jam dalam seminggu terakhir untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan (BPS, 2019). Bekerja dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yakni pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Pekerja penuh merupakan mereka yang bekerja selama 8-10 jam per hari atau lebih dari 35 jam per minggu. Sementara pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja tidak penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu.

Pengangguran merupakan mereka yang termasuk angkatan kerja namun tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, tidak bekerja karena sedang mempersiapkan usaha, tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mampu bekerja ataupun mereka yang sudah mempunyai pekerjaan namun belum mulai bekerja. Sementara itu, memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja merupakan mereka yang memiliki pekerjaan namun selama seminggu yang lalu mereka tidak bekerja dikarenakan sakit, cuti, mogok bekerja, dan sebagainya (BPS, 2019)

2.2.1.2 Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang memiliki kegiatan selama seminggu yang lalu seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau membantu tanpa memperoleh upah, penduduk yang tidak melakukan suatu kegiatan namun memperoleh penghasilan seperti pensiunan, dan penduduk yang tidak dapat melakukan kegiatan bekerja karena lanjut usia, cacat jasmani, dan sebagainya (Simanjuntak, 1985)

2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja

Todaro, (1998) Penyerapan Tenaga Kerja mengacu pada perekrutan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau untuk menggambarkan ketersediaan

pekerjaan yang akan diisi oleh pelamar kerja. Secara umum, pekerjaan ini menunjukkan seberapa banyak tenaga kerja yang diserap perusahaan untuk menghasilkan produk. Kemampuan menyerap tenaga kerja bervariasi menurut sektor. Untuk bekerja di sektor formal, diperlukan keterampilan khusus, pendidikan, serta pengalaman.

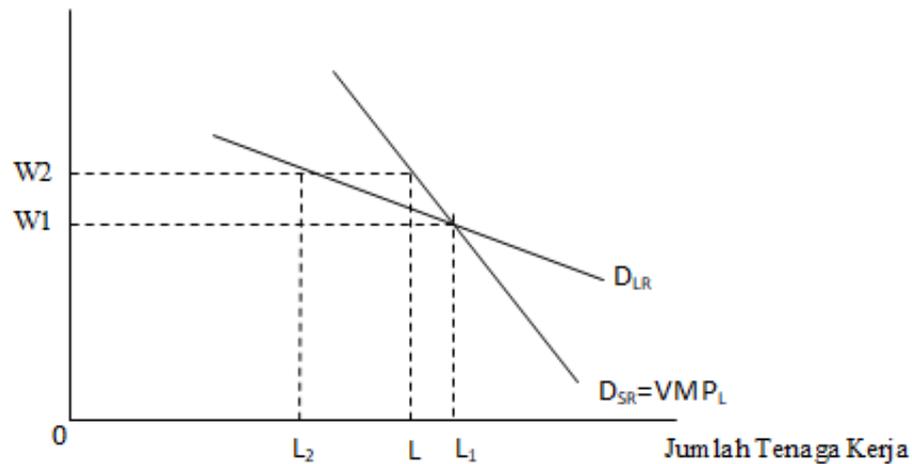
Sumarsono, (2009) menunjukkan bahwa lapangan kerja yang dapat diciptakan oleh perekonomian bergantung pada pertumbuhan dan penyerapan di setiap sektor. Faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja meliputi :

- a. Kemungkinan menggantikan tenaga kerja untuk faktor produksi lainnya.
- b. Elastisitas Permintaan terhadap barang yang diproduksi.
- c. Rasio biaya staf terhadap semua biaya produksi.
- d. Elastisitas suplai dari faktor produksi tambahan lainnya.

2.2.2.1 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja adalah teori yang menjelaskan berapa banyak pekerja dengan tingkat upah yang berbeda yang akan dipekerjakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Simanjuntak, 1985). Permintaan perusahaan akan tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Tuntutan perusahaan kepada tenaga kerja adalah membantu dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, yang kemudian dijual dan dibeli oleh konsumen. Sementara, konsumen akan membeli barang atau jasa karena barang tersebut dapat membawa utilitas bagi konsumen. Perilaku perusahaan yang menggunakan tenaga kerja akan bervariasi antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, penggunaan modal dianggap tetap, sementara tenaga kerja bersifat variabel. Sedangkan dalam jangka panjang baik modal maupun tenaga kerja bersifat variabel, karena dalam jangka panjang perusahaan cenderung mengganti faktor input yang relatif murah (Feriyanto, 2014)

Gambar 2.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja



Berdasarkan gambar 2.1, apabila terdapat kenaikan upah dari W_1 ke W_2 , maka jumlah permintaan tenaga kerja akan berkurang dari L_1 ke L (dalam jangka pendek). Sementara itu, dalam jangka panjang jumlah permintaan tenaga kerja akan berkurang dari L_1 ke L_2 . Pengurangan yang terjadi dalam jangka panjang lebih responsif dan akan digantikan dengan peningkatan modal. Baik jangka panjang maupun jangka pendek, keduanya memiliki hubungan yang negatif antara perubahan tingkat upah dengan permintaan jumlah tenaga kerja (Feriyanto, 2014)

2.2.3 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan kepekaan terhadap permintaan tenaga kerja karena adanya perubahan variabel independen yang memengaruhi tenaga kerja. Tingkat kepekaan dalam permintaan tenaga kerja dapat dilihat berdasarkan angka elastisitasnya. Jika angka elastisitas permintaan tenaga kerja tinggi, maka tingkat kepekaannya juga akan tinggi (Feriyanto, 2014). Sementara itu, angka elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan angka yang menunjukkan persentase perubahan permintaan tenaga kerja akibat perubahan satu persen pada variabel bebas yang memengaruhinya. Secara umum, rumus elastisitas permintaan tenaga kerja adalah persentase perubahan permintaan tenaga kerja dibagi persentase perubahan variabel bebas yang memengaruhi elastisitas permintaan tersebut.

Menurut Feriyanto, (2014), beberapa variabel bebas yang dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja diantaranya adalah :

a. Upah Tenaga Kerja

Upah atau gaji adalah pendapatan bagi karyawan yang memberikan jasanya kepada perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja untuk faktor input produksi. Jika upah tenaga kerja tinggi, maka permintaan tenaga kerja akan turun. Sehingga terdapat korelasi yang negatif antara upah tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.

b. Penjualan Produk

Jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan akan dipengaruhi oleh tingkat penjualan produk perusahaan tersebut. Jika penjualan produk di suatu perusahaan besar, maka akan semakin mendorong perusahaan untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produksi untuk mengimbangi peningkatan penjualan.

c. Tingkat Bunga

Dibandingkan dengan tingkat pengembalian investasi, tingkat suku bunga yang rendah dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan usahanya atau melakukan investasi lain. Akibatnya perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja, sehingga meningkatkan permintaan tenaga kerja. Namun sebaliknya, jika tingkat suku bunga nominal naik dikarenakan terjadi inflasi, maka akan mengakibatkan naiknya suku bunga nominal kredit. Hal tersebut akan mengurangi pinjaman investasi bagi perusahaan. Akibatnya, kemampuan perusahaan untuk menjaga tingkat produksinya akan berkurang seiring turunnya investasi baru, sehingga permintaan tenaga kerja akan menurun.

2.2.4 Investasi (Penanaman Modal)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Penanaman modal merupakan berbagai bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, yang digunakan untuk menjalankan usaha di Negara Republik Indonesia. Samuelson & Nordhaus,

(2011) mengemukakan bahwa penanaman modal terdiri dari peningkatan persediaan modal atau komoditas suatu negara dalam setahun, seperti alat produksi, bangunan, serta komoditas persediaan. Dalam kata lain, investasi merupakan suatu langkah mengorbankan konsumsi di masa depan.

2.2.4.1 Jenis Investasi

Terdapat beberapa jenis investasi, yaitu (Rosyidi, 2005):

- a. Investasi Otonom dan Investasi yang Diinduksi, yakni penanaman modal yang skalanya tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, namun skalanya dapat bergeser karena perubahan faktor selain pendapatan. Penanaman modal yang diinduksi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.
- b. Investasi Publik dan Investasi Swasta. Investasi Publik yakni penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dibuat oleh grup swasta. Sementara Investasi Swasta adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta.
- c. Investasi Domestik dan Investasi Asing. Investasi Domestik merupakan modal yang bersumber dari dalam negeri yang ditanamkan di dalam negeri. Sementara investasi asing merupakan modal yang bersumber dari luar negeri yang ditanamkan di dalam negeri.
- d. Investasi *Bruto* dan Investasi *Netto*. Investasi *Bruto* mengacu pada total investasi yang dilakukan atau dilaksanakan pada suatu waktu, di mana nilainya bisa positif ataupun nol (tidak ada investasi sama sekali), namun tidak akan negatif. Sementara itu, investasi *Netto* merupakan perbedaan antara total investasi dan depresiasi.

Di Indonesia investasi secara umum dibedakan menjadi dua macam, yakni investasi domestik dan investasi asing. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1968, investasi domestik atau yang dikenal juga dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan pemanfaatan kekayaan bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya hak kekayaan milik negara atau swasta asing yang menetap di Indonesia. Penanaman modal dalam negeri ini diperlukan guna keberlangsungan kegiatan usaha di berbagai sektor yang mendorong pembangunan ekonomi.

Suyatno, (2003) mendefinisikan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) sebagai aliran modal dari luar negeri ke swasta baik melalui investasi langsung maupun investasi tidak langsung (sekuritas). Penanaman Modal Asing terdiri dari dua macam, yakni investasi portofolio dan investasi asing langsung (Salvatore, 2014). Investasi portofolio merupakan investasi yang hanya terdiri dari aset keuangan, seperti saham dan obligasi. Biasanya investasi ini dilakukan melalui perantara lembaga keuangan. Sedangkan, investasi asing langsung merupakan investasi dalam bentuk aset nyata, misalnya pengadaan barang modal, pembangunan pabrik, dan sebagainya.

2.2.4.2 Teori Investasi

Terdapat beberapa teori investasi, diantaranya :

- a. Teori Harrod Dommar. Harrod Dommar meyakini bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang atau jasa sehingga menciptakan permintaan yang efektif dari seluruh masyarakat. Jika banyak pembentukan modal yang terjadi dalam periode tertentu, maka pada periode berikutnya perekonomian memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2009)
- b. Teori Neo Klasik. Tokoh Neo Klasik, yakni Sollow dan Swan memiliki fokus terhadap interaksi antara pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan output selama pertumbuhan ekonomi. Menurut teori klasik, persediaan modal rata-rata per angkatan kerja akan semakin cepat tumbuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Jika rasio modal masing-masing pekerja semakin tinggi, maka produktivitas setiap pekerja akan semakin tinggi pula (Arsyad, 2010).

2.2.4.3 Faktor yang memengaruhi Investasi

Menurut Rosyidi, (2005) ada dua faktor yang memengaruhi jumlah investasi di suatu negara, yaitu *Marginal Efficiency of Capital* dan tingkat suku bunga. *Marginal Efficiency of Capital* merupakan besaran keuntungan yang akan

didapatkan dari penanaman modal. Sementara tingkat suku bunga merupakan persentase yang harus dibayarkan atau dikembalikan dari sejumlah uang tertentu yang telah digunakan. Tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan investasi. Artinya, jika tingkat suku bunga naik, maka jumlah investasi akan turun. Hal tersebut dikarenakan tingkat suku bunga akan memengaruhi biaya modal di suatu negara. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga, maka biaya modal di negara tersebut juga akan tinggi, yang menyebabkan biaya produksi untuk menghasilkan barang menjadi mahal. *Marginal Efficiency of Capital* dan tingkat suku bunga tidak bisa dipisahkan, karena saling memengaruhi satu sama lain.

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik merupakan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di suatu daerah terlepas dari apakah faktor produksinya berasal atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, sehingga pendapatan yang dihasilkan dengan adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Sedangkan produk regional merupakan produk domestik ditambah pendapatan faktor produksi yang diperoleh dari luar daerah atau negara, dikurangi pendapatan faktor produksi yang dibayarkan di luar daerah atau negara, sehingga produk regional merupakan produk yang dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen (BPS, 2016)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor usaha di suatu daerah, atau nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di daerah tersebut, (BPS, 2016). PDRB dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan harga konstan (dikenal juga dengan PDRB Riil) dan berdasarkan harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu dengan tujuan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahunan,

yang bertujuan untuk mengamati perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, perbandingan dari kedua PDRB tersebut dapat digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu daerah (BPS, 2016)

2.2.5.1 Pendekatan Perhitungan PDRB

Menurut BPS, (2016) Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung Pendapatan Domestik Regional Bruto, yang mana ketiganya akan memiliki hasil perhitungan yang sama. Berikut adalah tiga pendekatan dalam menghitung PDRB:

- a. PDRB dengan Pendekatan Produksi, merupakan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan setiap unit produksi dalam kurun waktu tertentu di wilayah tertentu (biasanya satu tahun). Dalam pendekatan ini, terdapat sembilan sektor unit produksi yang diperhitungkan, yaitu :
 - 1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
 - 2) Pertambangan dan penggalian
 - 3) Industri pengolahan (manufaktur)
 - 4) Listrik, gas dan air bersih
 - 5) Konstruksi
 - 6) Perdagangan, hotel dan restoran
 - 7) Pengangkutan dan komunikasi
 - 8) Keuangan, real estate dan jasa perumahan
 - 9) Jasa-jasa lainnya.
- b. PDRB dengan Pendekatan Pengeluaran, merupakan perhitungan PDRB dengan menjumlahkan nilai pasar (yang diukur pada harga pasar saat ini) dari semua permintaan akhir yang diproduksi dalam perekonomian. Dari sisi pengeluaran, komponen PDRB terdiri dari
 - !) Pengeluaran konsumsi rumah tangga (C)
 - 2) Investasi sektor bisnis (I)
 - 3) Belanja pemerintah (G)
 - 4) Ekspor neto (X-M)

c. PDRB dengan Pendekatan Pendapatan, merupakan PDRB yang diperoleh dari menjumlahkan pendapatan bersama dari faktor produksi yang berperan dalam proses produksi. Komponen yang terdiri dari sisi ini yaitu :

- 1) Jaminan sosial
- 2) Laba perusahaan
- 3) Pendapatan individu
- 4) Pendapatan sewa
- 5) Bunga netto

2.2.6 Upah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang dari pemberi kerja sebagai kompensasi kepada pekerja, yang ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya pekerja yang telah dan akan melakukan pekerjaan serta tunjangan keluarga.

Nasution, (1994) mengemukakan bahwa upah merupakan penghargaan yang diberikan kepada penerima pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah merupakan jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan produksi, yang dinyatakan dalam bentuk uang yang ditentukan berdasarkan pekerjaan, penilaian ataupun perjanjian kerja.

2.2.6.1 Jenis Upah

Menurut G. Kartasapoetra yang dikutip dari Setiawan, (2017) Upah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Upah Nominal, merupakan imbalan berupa upah yang dibayarkan kepada pekerja dalam bentuk uang tunai berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja suatu industri atau departemen perusahaan atau organisasi kerja, tanpa memberinya tambahan upah atau tunjangan lainnya. Upah ini biasa disebut juga upah uang.

- b. Upah Nyata atau Upah Riil, merupakan upah yang harus diterima oleh orang yang memenuhi syarat. Upah riil ditentukan oleh daya beli upah, yang sangat bergantung pada jumlah uang yang diterima dan besar kecilnya biaya hidup yang dibutuhkan. Kadang-kadang, upah diberikan dalam bentuk uang atau fasilitas. Sehingga upah riil yang akan diterima nantinya adalah sejumlah upah uang dan nilai fasilitas dalam rupiah.
- c. Upah Hidup, merupakan upah yang diterima oleh seseorang relatif mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih luas. Tidak hanya kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi, tetapi juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, memperoleh makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi, pembayaran asuransi, dan sebagainya.
- d. Upah Minimum, merupakan upah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati atau walikota berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan memperhatikan beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta kebutuhan hidup minimum (Feriyanto, 2014)

2.2.6.2 Faktor Yang memengaruhi Tingkat Upah

Menurut Agus, (1992) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi penetapan tingkat upah, seperti :

- a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja. Jika suatu pekerjaan memiliki penawaran tenaga kerja rendah dikarenakan pekerjaan tersebut memiliki keterampilan khusus, namun permintaan akan tenaga kerja tersebut tinggi, maka tingkat upah yang ditawarkan akan cenderung tinggi. Sementara itu, jika pekerjaan memiliki permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tinggi serta tidak membutuhkan keterampilan khusus, maka tingkat upah yang ditawarkan cenderung rendah.
- b. Serikat Pekerja. Suatu perusahaan yang memiliki serikat pekerja, akan menjadikan kedudukan pekerja di perusahaan tersebut semakin kuat.

Kedudukan yang kuat akan menyebabkan daya tawar pekerja menjadi lebih tinggi.

- c. Produktivitas Pekerja. Semakin baik kinerja yang dilakukan oleh karyawan, maka semakin tinggi pula upah yang akan diberikan.
- d. Kemampuan Perusahaan dalam Memberi Upah. Mengingat upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, maka pemberian upah yang tinggi akan mengakibatkan biaya produksi yang tinggi pula. Apabila tidak sebanding dengan output yang dihasilkan, kenaikan upah yang tinggi akan menyebabkan kerugian pada perusahaan.
- e. Biaya Hidup. Biaya hidup menjadi salah satu variabel dalam menentukan batas upah selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, batas penerimaan upah akan mengikuti biaya hidup di suatu daerah.
- f. Pemerintah. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengupahan, misalnya surat keputusan gubernur terkait upah minimum.
- g. Konsistensi Internal dan Eksternal.

2.2.6.3 Mekanisme Penetapan Upah Minimum

Upah Minimum ditetapkan oleh kepala daerah, baik oleh Gubernur di tingkat Provinsi maupun Bupati atau Walikota di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam menentukan Upah Minimum, kepala daerah mempertimbangkan usulan yang berasal dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan beberapa variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, biaya hidup, kondisi pasar tenaga kerja, dan sebagainya (Feriyanto, 2014)

Terkait tata cara penetapan upah minimum, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan agar mekanisme penetapan dapat dilakukan dengan baik, yakni Permenaker No.1 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-226/MEN/2000.

Setiap satu tahun sekali, pemerintah akan melakukan peninjauan terhadap besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain UMP dan UMK, terdapat pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota). Upah Minimum Sektoral merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan pada kesepakatan upah antara serikat pekerja. Dalam penerapannya, upah minimum yang berlaku hanyalah salah satu dari keempat jenis upah tersebut. Setiap perusahaan atau pelaku industri, wajib mengupah pekerjanya sebesar batas minimal upah yang telah ditetapkan. Namun, apabila perusahaan merasa tidak mampu melakukan hal tersebut, maka perusahaan dapat mengajukan penangguhan yang diatur dalam Permenaker No. KEP-231/MEN/2003.

Menurut Permenaker No.17 Tahun 2005 dan Permenaker No. 13 Tahun 2012, dalam menetapkan upah minimum perlu mempertimbangkan lima faktor, yaitu :

- a. Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan bagi seorang pekerja agar bisa hidup secara layak dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam menetapkan nilai KHL, pemerintah melakukan peninjauan melalui data dan informasi yang diperoleh dari lembaga yang memiliki wewenang seperti BPS. Pengkajian KHL dilakukan setiap lima tahun sekali dan dilakukan oleh Dewan Pengupahan.
- b. Produktivitas Makro. Upah minimum dikatakan layak apabila upah tersebut seimbang dengan pendapatan perkapita di wilayah tersebut.
- c. Pertumbuhan Ekonomi. Jika suatu wilayah memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka aktivitas ekonomi di wilayah tersebut juga tinggi. Aktivitas ekonomi yang tinggi akan menyebabkan permintaan akan uang meningkat. Tingginya permintaan uang di suatu wilayah akan mengakibatkan inflasi di wilayah tersebut, sehingga dalam menetapkan upah minimum harus

mempertimbangkan kemungkinan inflasi agar daya beli pekerja tidak menurun, yakni dengan cara menaikkan upah nominal.

- d. Kondisi Pasar Kerja. Dalam menentukan upah minimum, pemerintah juga mempertimbangkan jumlah lowongan kerja yang tersedia agar kebijakan terkait upah minimum tidak membatasi permintaan tenaga kerja dan menambah jumlah pengangguran. Kondisi pasar kerja saat ini cenderung lebih banyak penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja. Jika pemerintah terus menaikkan upah minimum, maka ada kemungkinan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja, mengingat upah merupakan salah satu komponen biaya produksi.
- e. Kondisi Usaha Marjinal. Usaha marjinal dapat disebut juga dengan usaha yang tidak memiliki kemampuan tinggi dalam mengupah pekerjanya. Dalam penetapan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan perusahaan marjinal agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian karena tidak mampu memberikan upah minimum yang berlaku. Jika perusahaan marjinal mengalami kerugian, maka akan berdampak juga pada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan paradigma penelitian, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Hipotesis Penelitian Secara Simultan

Ha : Investasi, PDRB Riil dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

2. Hipotesis Penelitian Secara Parsial

H1 : Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

H2 : PDRB Riil berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.

H3 : UMK berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun data yang penulis peroleh berasal dari laman lembaga resmi pemerintahan dan juga dinas terkait, seperti Website Biro Hukum dan HAM SETDA Provinsi Jawa Barat, BPS Jawa Barat, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Selain itu penulis juga melakukan metode dokumentasi, yakni dengan cara membaca dan mencatat data-data serta informasi dari buku maupun media cetak elektronik mengenai topik yang akan penulis bahas.

Berikut adalah data yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

1) Data Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

Penyerapan Tenaga Kerja direpresentasikan oleh Total Jumlah Orang Bekerja, sehingga data yang digunakan adalah data Jumlah Orang Bekerja berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Khusus pada tahun 2016, pemerintah Jawa Barat tidak melakukan perhitungan data orang yang bekerja di tingkat kabupaten/kota dikarenakan sampel Sakernas yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, data Jumlah Orang Bekerja yang tertera di tahun 2016 dalam penelitian ini adalah hasil dari perhitungan rata-rata Jumlah Orang Bekerja di tahun 2015 dan 2017.

2) Data Investasi Provinsi Jawa Barat

Data Investasi dalam penelitian ini merupakan nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Di tahun 2019 terdapat 3 daerah yang tidak tersedia data investasinya, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, sehingga nantinya 3 daerah tersebut akan dikecualikan dalam perhitungan.

- 3) Data Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 4) Data Upah Minimum di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu 3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Yang dimaksud variabel bebas dalam penelitian ini adalah Investasi (X1), Laju PDRB Riil (X2), dan UMK (X3) sedangkan variabel terikatnya adalah Jumlah Orang Bekerja (Y). Berikut adalah identifikasi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini :

1) Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk bekerja atau bisa disebut juga dengan pekerja yang dinyatakan dengan satuan orang dan berumur 15 tahun ke atas, tahun 2015-2019. Penulis memutuskan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utamanya adalah serapan tenaga kerja.

2) Investasi (X1)

Dalam penelitian ini, investasi atau penanaman modal menjadi variabel independen pertama. Alasan penulis menjadikan investasi sebagai variabel independen dikarenakan investasi merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja. Investasi sendiri merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan menciptakan lapangan kerja. Adanya investasi akan menciptakan keterkaitan dengan industri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas di suatu sektor usaha yang kurang berkembang menjadi sektor unggulan sehingga semakin memperluas kesempatan kerja. Investasi yang dimaksud dalam

variabel ini adalah investasi yang berupa Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan juga Penanaman Modal Asing (PMA).

3) PDRB Riil (X2)

Variabel independen selanjutnya adalah PDRB Riil. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian di suatu wilayah dapat dilihat dari kondisi PDRB atau output yang mampu dihasilkan di wilayah tersebut. Ketika suatu sektor usaha mampu menghasilkan barang, maka sektor usaha tersebut akan mengambil peran tenaga kerja dalam proses produksinya. Sehingga apabila semakin banyak barang yang dihasilkan maka menggambarkan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Dalam kata lain, PDRB memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja. Sementara itu data untuk variabel ini menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan di 27 kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, dengan satuan persen.

4) Upah Minimum Kabupaten/Kota (X3)

Upah minimum merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan sebagai pengaman bagi para pekerja. Upah minimum berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah minimum dapat menjadi acuan baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja terkait permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila upah minimum di suatu daerah tinggi, maka permintaan tenaga kerja di daerah tersebut cenderung rendah, dikarenakan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi. Dan sebaliknya, apabila upah minimum di suatu daerah rendah, maka permintaan tenaga kerja akan cenderung tinggi.

3.3 Metode Analisis

Pada penelitian ini, penulis menggunakan model regresi data panel, yakni penggabungan data *time series* dan data *cross section*. Pada data panel, *degree of freedom* yang dihasilkan akan lebih besar karena data yang disediakan lebih banyak (Widarjono, 2018). Sementara itu, regresi dalam penelitian ini akan diolah menggunakan program Eviews 9.

3.3.1 Model Estimasi Data Panel

Widarjono, (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga model dalam mengestimasi data panel, yaitu :

a. *Common Effect Model (CEM)*

Model *Common Effect* merupakan teknik yang paling sederhana dalam pendekatan data panel, yakni hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan individu. Dengan kata lain, perilaku individu dianggap sama dalam berbagai kurun waktu. Berikut adalah bentuk persamaan *Common Effect* untuk penelitian ini :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 \ln \text{Investasi}_{it} + \beta_3 \ln \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \ln \text{UMK}_{it} + e_i$$

di mana :

Y_i = Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

Investasi = Realisasi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

PDRB = Nilai PDRB atas harga konstan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

β = Koefisien Regresi

i = Jumlah Observasi

t = Waktu

$i \times t$ = Data Panel

e_i = Nilai Residual/ faktor pengganggu di luar model

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan *intersep* antar individu namun tidak ada perbedaan *intersep* antar waktu. Untuk melihat adanya perbedaan *intersep* maka digunakan variabel dummy dalam mengestimasi data panel, atau dikenal juga dengan *Least Square Dummy Variables (LSDV)*. Model *Fixed Effect* untuk penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 \ln \text{Investasi}_{it} + \beta_3 \ln \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \ln \text{UMK}_{it} + \beta_5 D_{it} + \dots + \beta_n D_{ni} + e_i$$

di mana :

$D_{it} = 1$ untuk kabupaten/kota X dan 0 untuk kabupaten/kota lainnya

c. *Random Effect Model (REM)*

Model *Random Effect* digunakan untuk mengestimasi data panel apabila terdapat variabel gangguan yang mungkin saling berhubungan baik antar individu maupun antar waktu. Model ini juga digunakan untuk mengatasi konsekuensi kurangnya derajat kebebasan dan kurangnya efisiensi parameter. Model *Random Effect* untuk penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 \ln \text{Investasi}_{it} + \beta_3 \ln \text{PDRB}_{it} + \beta_4 \ln \text{UMK}_{it} + V_{it}$$

di mana :

$$V_{it} = e_i + u_i$$

3.3.2 Pemilihan Model

Dalam bukunya, Widarjono, (2018) menjelaskan bahwa untuk menentukan model yang tepat, maka diperlukan beberapa pengujian sebagai berikut :

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk memilih mana model yang paling cocok antara model *common effect* dengan *fixed effect*. Uji ini dilakukan dengan cara melihat nilai *p-value*. Jika *p-value* kurang dari *alpha* maka menolak H_0 . Sementara jika *p-value* lebih dari *alpha* maka gagal menolak H_0 atau menolak H_a . Hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H_0 = Memilih model *Common Effect*

H_a = Memilih model *Fixed Effect*

b. Uji *LM*

Uji *LM* digunakan untuk memilih mana model yang paling cocok antara model *common effect* dengan *random effect*. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas *Breusch Pagan*. Jika probabilitas *breusch pagan* kurang dari *alpha* maka menolak H_0 . Sedangkan jika probabilitas *breusch pagan* lebih dari *alpha* maka gagal menolak H_0 . Hipotesisnya adalah :

H_0 : Memilih model *Common Effect*

H_a : Memilih model *Random Effect*

c. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih mana model yang paling cocok antara model *fixed effect* dengan *random effect*. Apabila nilai *p-value* kurang dari *alpha* maka menolak H_0 . Sedangkan jika *p-value* lebih dari *alpha* maka gagal menolak H_0 . Hipotesisnya yakni :

H_0 : Memilih model *Random Effect*

H_a : Memilih model *Fixed Effect*

3.3.3 Uji Statistik

Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t) dan Koefisien Determinasi. Dikutip dari Widarjono, (2018) berikut adalah penjelasan dari masing-masing uji tersebut :

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Apabila F hitung lebih besar dari F kritis, maka menolak H_0 . Sementara jika F hitung kurang dari F kritis, maka gagal menolak H_0 .

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk melihat hubungan masing-masing antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah :

H_0 : Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_a : Variabel dependen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Apabila nilai t hitung lebih kecil dari t kritis, maka menerima H_0 . Sementara jika nilai t hitung lebih besar dari t kritis maka menolak H_0 atau menerima H_a

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Untuk melihat hal tersebut, maka yang perlu dilihat adalah nilai R^2 pada hasil regresi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat. Data tersebut terdiri dari Jumlah Orang Bekerja, Investasi, PDRB Riil, dan UMK Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Kab/Kota	Variabel	TK (Jiwa)	Investasi (Rupiah)	PDRB Riil (Rupiah)	UMK (Rupiah)
Bogor	Min	2,083,234	6,395,725,363,556	124,486,980,000,000	2,590,000
	Max	2,356,875	9,180,854,686,960	156,869,704,110,000	3,763,406
	Mean	2,309,599	8,160,110,085,146	140,176,666,822,000	3,200,390
Sukabumi	Min	912,272	497,723,833,637	37,265,250,000,000	1,940,000
	Max	1,037,532	4,939,175,032,527	4,939,175,032,527	2,791,016
	Mean	996,705	1,610,818,904,989	1,610,818,904,989	2,377,313
Cianjur	Min	846,258	184,326,331,297	25,352,130,000,000	1,600,000
	Max	976,058	1,587,644,944,169	31,974,682,250,000	2,336,005
	Mean	884,403	830,716,609,731	28,627,098,450,000	1,985,001
Bandung	Min	1,438,365	861,518,734,112	64,701,520,000,000	2,001,195
	Max	1,688,206	5,259,534,592,471	82,336,632,900,000	2,893,075
	Mean	1,559,600	2,670,954,253,036	73,297,114,580,000	2,462,295
Garut	Min	945,768	237,422,400,000	31,919,060,000,000	1,250,000
	Max	1,071,026	2,074,742,773,865	39,092,646,890,000	1,807,286
	Mean	1,014,886	741,779,205,269	35,500,867,378,000	1,538,154
Tasikmalaya	Min	724,664	5,013,733,217	19,662,490,000,000	1,435,000
	Max	813,411	73,866,160,629	24,586,988,470,000	2,075,189
	Mean	763,548	33,616,678,462	22,091,441,694,000	1,768,035
Ciamis	Min	494,078	249,559,965	17,779,910,000,000	1,131,862
	Max	602,123	131,871,877,290	22,028,877,240,000	1,733,162
	Mean	564,250	56,570,613,078	19,877,051,448,000	1,461,694
Kuningan	Min	425,700	5,267,000,000	13,175,670,000,000	1,206,000
	Max	453,781	158,328,673,940	16,860,516,960,000	1,734,994
	Mean	435,690	66,395,854,636	14,940,505,392,000	1,477,827
Cirebon	Min	813,824	426,024,047,529	27,596,250,000,000	1,400,000
	Max	955,506	8,978,364,542,671	33,723,897,180,000	2,024,160

	Mean	877,643	4,146,640,365,437	30,650,591,436,000	1,722,732
Majalengka	Min	569,252	131,391,403,339	16,590,930,000,000	1,245,000
	Max	600,450	5,547,512,815,162	21,358,916,540,000	1,791,693
	Mean	579,508	2,140,597,740,470	18,852,581,308,000	1,525,040
Sumedang	Min	481,029	581,362,409,009	18,950,360,000,000	2,001,195
	Max	526,229	4,240,950,296,308	23,939,288,720,000	2,893,075
	Mean	502,778	1,652,508,247,349	21,342,645,744,000	2,462,295
Indramayu	Min	677,201	17,265,642,985	56,663,300,000,000	1,465,000
	Max	818,449	1,500,245,339,784	60,154,352,200,000	2,117,714
	Mean	745,860	606,411,251,524	57,855,550,440,000	1,802,413
Subang	Min	633,116	907,810,970,901	23,696,760,000,000	1,900,000
	Max	762,065	2,532,669,668,356	28,572,443,610,000	2,732,900
	Mean	702,036	1,727,761,816,044	26,181,926,722,000	2,327,890
Purwakarta	Min	371,543	3,966,332,363,639	37,899,020,000,000	2,600,000
	Max	406,779	6,226,744,759,521	46,287,984,380,000	3,722,300
	Mean	389,745	5,154,936,464,191	42,185,414,876,000	3,173,091
Karawang	Min	873,995	14,835,316,008,199	132,453,570,000,000	2,957,450
	Max	1,026,586	28,994,915,526,064	163,745,564,950,000	4,234,010
	Mean	973,459	23,109,009,937,269	149,208,486,990,000	3,609,306
Bekasi	Min	1,344,821	32,626,277,756,702	205,950,390,000,000	2,840,000
	Max	1,619,175	54,057,620,148,412	252,051,029,190,000	4,146,126
	Mean	1,441,691	43,194,794,111,702	228,826,397,838,000	3,523,176
Bandung Barat	Min	563,252	467,767,625,639	25,486,170,000,000	2,004,637
	Max	704,266	4,124,276,389,299	31,398,351,990,000	2,898,745
	Mean	648,158	1,480,503,234,597	28,405,862,398,000	2,467,025
Pangandaran	Min	192,391	100,500,014	6,271,100,000,000	1,165,000
	Max	235,561	528,540,864,250	7,750,924,240,000	1,714,673
	Mean	219,405	192,131,251,066	6,975,938,848,000	1,439,398
Kota Bogor	Min	400,983	280,115,818,957	25,298,600,000,000	2,658,155
	Max	486,867	5,187,390,018,903	32,250,502,080,000	3,842,786
	Mean	446,539	2,334,021,981,377	28,723,978,416,000	3,270,599
Kota Sukabumi	Min	130,909	929,959,961	6,985,330,000,000	1,572,000
	Max	140,827	75,607,500,000	8,659,534,250,000	2,331,753
	Mean	134,132	27,227,204,352	7,802,708,850,000	1,976,370
Kota Bandung	Min	1,084,989	2,077,222,156,525	149,580,380,000,000	2,310,000
	Max	1,183,193	11,986,714,995,203	197,642,705,130,000	3,339,581
	Mean	1,118,691	5,988,224,081,426	173,277,411,026,000	2,842,306
Kota Cirebon	Min	126,821	10,374,699,219	13,269,240,000,000	1,415,000
	Max	148,033	561,948,538,275	16,812,908,000,000	2,045,422
	Mean	138,060	241,906,855,096	14,973,953,600,000	1,740,887
Kota Bekasi	Min	1,081,936	842,859,850,002	55,456,070,000,000	2,954,031
	Max	1,383,287	7,240,583,700,991	69,404,619,530,000	4,229,757
	Mean	1,246,436	4,310,349,780,258	62,347,603,906,000	3,605,590
Kota Depok	Min	896,981	567,760,050,000	37,529,480,000,000	2,705,000

	Max	1,112,358	6,164,958,480,781	49,076,626,470,000	3,872,552
	Mean	1,000,045	2,050,278,534,143	43,135,841,294,000	3,301,184
Kota Cimahi	Min	257,105	174,235,679,030	17,876,440,000,000	2,001,200
	Max	273,955	1,326,167,109,385	22,641,829,270,000	2,893,074
	Mean	268,038	641,241,946,751	20,069,201,854,000	2,462,296
Kota Tasikmalaya	Min	287,233	2,219,600,000	12,370,620,000,000	1,450,000
	Max	301,406	124,116,376,077	15,746,106,690,000	2,086,530
	Mean	295,203	44,632,335,340	14,046,261,338,000	1,777,186
Kota Banjar	Min	77,929	628,261,404	2,624,240,000,000	1,168,000
	Max	88,846	1,684,609,413,240	3,220,752,970,000	1,688,218
	Mean	83,380	1,083,870,157,332	2,920,716,594,000	1,436,887

Sumber : Hasil olah data sekunder, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 rata-rata penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 20.339.486 Jiwa. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi di Kabupaten Bogor, yakni sebesar 2.309.599 Jiwa. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bogor banyak memiliki UMKM. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja terendah terjadi di Kota Banjar, yakni sebesar 83.380 Jiwa. Hal ini dikarenakan Kota Banjar yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis dan juga luas wilayah Kota Banjar yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Jawa Barat.

Investasi tertinggi terjadi di Kabupaten Bekasi, yakni sebesar Rp 43.194.794.111.702. Hal tersebut dikarenakan letak geografis Kabupaten Bekasi yang sangat potensial dan juga memadainya akses serta infrastruktur di Kabupaten ini. Dari angka tersebut, sektor manufaktur dan otomotif menjadi penyumbang terbesar investasi di Kabupaten Bekasi. Sedangkan investasi terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebesar Rp 33.616.678.462. Minimnya investasi tersebut dikarenakan kendala akses masuk ke Kabupaten Tasikmalaya yang dilalui oleh jalur berisiko tinggi, seperti jalur Nagreg dan Gentong.

Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar Rp 228.826.397.838.000. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bekasi menjadi salah satu kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Jawa Barat, di mana terdapat +/- 4000 pabrik yang beroperasi (Ayumi, 2020). Sedangkan PDRB terendah terjadi di Kota Banjar, yakni Rp 1.083.870.157.332.

Sementara itu, UMK tertinggi berada di Kabupaten Karawang, yakni sebesar Rp 3.609.306 dan UMK terendah berada di Kabupaten Banjar, sebesar Rp 1,436,887.

4.2 Hasil dan Analisis

4.2.1 Pemilihan Model

4.2.1.1 Uji Chow

Uji Chow diperlukan untuk melihat manakah model yang layak digunakan antara Common Effect Model dengan Fixed Effect Model. Berikut adalah hipotesisnya :

H₀ : Menggunakan *Common Effect Model*

H_a : Menggunakan *Fixed Effect Model*

Asumsi :

Jika P-value < α 5% menerima H_a

Jika P-value > α 5% menerima H₀

Tabel 4.2 Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	d.f	Prob.
Period F	0.523390	(4,124)	0.7187
Period Chi-Square	2.210024	4	0.6972

Sumber : Hasil olah data eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai probabilitas *chi square* 0,6972 > α 5% sehingga menerima H₀ atau dalam kata lain model yang layak digunakan adalah model *Common Effect*.

4.2.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman diperlukan untuk melihat manakah model yang layak digunakan antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Hipotesisnya adalah :

H₀ : Menggunakan Random Effect Model

Ha : Menggunakan Fixed Effect Model

Asumsi :

Jika P-value $< \alpha$ 5% menerima Ha

Jika P-value $> \alpha$ 5% menerima H0

Tabel 4.3 Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-square Statistic</i>	<i>Chi-square d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Period Random</i>	2.079268	3	0.5561

Sumber : Hasil olah data eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan nilai probabilitas $0,5561 > \alpha$ 5% sehingga menerima H0 atau dalam kata lain model yang layak digunakan adalah model *Random Effect*.

4.2.1.3 Uji LM

Uji LM diperlukan untuk melihat manakah model yang layak digunakan antara *Common Effect Model* dengan *Random Effect Model*. Hipotesisnya adalah :

H0 : Menggunakan Common Effect Model

Ha : Menggunakan Random Effect Model

Asumsi :

Jika P-value $< \alpha$ 5% menerima Ha

Jika P-value $> \alpha$ 5% menerima H0

Tabel 4.4 Uji LM

	Cross Section	Test Hypothesis time	Both
Breusch Pagan	248.1266 (0.0000)	1.156476 (0.2822)	249.2831 (0.0000)

Sumber : Hasil olah data eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan probabilitas Breusch Pagan $0,0000 < \alpha 5\%$ sehingga menerima H_a atau dalam kata lain model yang layak digunakan adalah model *Random Effect*.

4.2.2 Model Regresi Panel Random Effect

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, model yang paling layak digunakan untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat adalah model Random Effect.

Tabel 4.5 Model Random Effect

Dependent Variable: LOG(Y)				
Method: Panel EGLS (Period random effects)				
Date: 11/17/20 Time: 22:27				
Sample: 2015 2019				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 27				
Total panel (unbalanced) observations: 132				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.205007	1.714902	-2.452040	0.0156
LOG(INVESTASI)	0.006417	0.019284	0.332754	0.7399
LOG(PDRB)	0.787431	0.056124	14.03019	0.0000
LOG(UMK)	-0.490280	0.149343	-3.282916	0.0013
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Period random			0.000000	0.0000
Idiosyncratic random			0.405512	1.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.741872	Mean dependent var		13.28670
Adjusted R-squared	0.735822	S.D. dependent var		0.783063
S.E. of regression	0.402481	Sum squared resid		20.73479
F-statistic	122.6262	Durbin-Watson stat		0.017844
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.741872	Mean dependent var		13.28670
Sum squared resid	20.73479	Durbin-Watson stat		0.017844

Berikut adalah model regresi berganda untuk penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat :

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_2 \ln X1_{it} + \beta_3 \ln X2_{it} + \beta_4 \ln X3_{it} + V_{it}$$

$$\ln Tk = -4.205007 + 0.006417 + 0.787431 - 0.490280 + V_{it}$$

Di mana :

TK = Tenaga Kerja (Jiwa)

X1 = Investasi (Rupiah)

X2 = PDRB Riil (Rupiah)

X3 = UMK (Rupiah)

4.2.3 Pengujian Hipotesis

4.2.3.1 Hasil Uji t

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk melihat hubungan masing-masing antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh masing-masing variabel independen yakni Investasi, PDRB Riil, dan UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat, sehingga dilakukanlah Uji t dengan membandingkan antara nilai probabilitas dan alpha 5% (0,05).

1. Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi model *Random Effect* diperoleh nilai koefisien investasi sebesar 0.006417 dengan probabilitas 0.7399. Nilai probabilitas 0.7399 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga menerima H0, atau dalam kata lain investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Sebelumnya, Hayyu (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta dengan pengujian menggunakan Regresi Berganda. Dalam penelitian tersebut, didapatkan hasil

bahwa investasi memiliki korelasi yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini, terdapat persamaan hasil dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2. Pengaruh PDRB Riil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi model *Random Effect* diperoleh nilai koefisien PDRB Riil sebesar 0.787431 dengan probabilitas 0.0000. Nilai probabilitas 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga gagal menerima H_0 , atau dalam kata lain, PDRB Riil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Sebelumnya, Hizbullah, (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat.

Terdapat perbedaan hasil antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, dimana pada penelitian sebelumnya PDRB memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat.

3. Pengaruh UMK terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil regresi model *Random Effect* diperoleh nilai koefisien UMK sebesar - 0.490280 dengan probabilitas 0.0013. Nilai probabilitas 0,0013 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga gagal menerima H_0 , atau dalam kata lain UMK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat.

Sebelumnya, Sari (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Dalam

penelitian tersebut diperoleh hasil jika Upah Minimum berpengaruh positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat. Terdapat perbedaan antara penelitian yang sebelumnya telah dilakukan dengan penelitian kali ini, dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2018) Upah Minimum memiliki pengaruh yang positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat, sementara dalam penelitian ini hasil menunjukkan jika Upah Minimum tidak berpengaruh negatif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat

4.2.3.2 Hasil Uji F

Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel independen, yang dalam penelitian ini adalah Investasi, PDRB Riil dan UMK secara bersama-sama memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat.

Tabel 4.6 Uji F

Variabel	Prob.F
Investasi	0,0000
PDRB Riil	
UMK	

Sumber : Hasil olah data eviews 9, 2020

Berdasarkan hasil regresi model *Random Effect*, didapatkan nilai probabilitas F sebesar $0,0000 < \alpha 0,05$ sehingga menolak H_0 . Artinya, Investasi, PDRB Riil dan UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

4.2.3.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil regresi di atas, didapatkan nilai *Adjusted R²* sebesar 0.735822. Artinya, variabel independen yang dalam penelitian ini adalah Investasi, PDRB Riil dan UMK mampu menjelaskan Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat sebesar 73,58%. Sementara sisanya, 26,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan pengujian model *Random Effect*, diketahui jika Investasi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan mayoritas investasi yang masuk di Provinsi Jawa Barat adalah berjenis padat modal, seperti misalnya industri mesin dan elektronik yang ada di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Terdapat dua orientasi dalam Investasi, yakni Investasi Padat Karya dan Investasi Padat Modal (Budiarto & Dewi, 2015). Jika investasi berorientasi padat karya, maka investasi tersebut akan banyak menyerap tenaga kerja, sementara jika orientasi investasi adalah padat modal, maka penyerapan tenaga kerja cenderung berkurang.

4.3.2 Analisis Pengaruh PDRB Riil Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Dari hasil uji model *Random Effect*, PDRB Riil secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Koefisien PDRB sebesar 0.787431 dan memiliki *slope* positif. Artinya, jika PDRB naik sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat naik sebesar 0,7874%. Hal tersebut sesuai dengan teori yang berlaku, di mana PDRB berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.

Tingginya PDRB di suatu wilayah menunjukkan bahwa jumlah barang akhir yang dihasilkan di wilayah tersebut juga tinggi, sehingga permintaan tenaga kerja di wilayah tersebut juga akan tinggi seiring dengan tingginya jumlah barang yang diproduksi. Berdasarkan koefisien, dapat disimpulkan jika PDRB inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

4.3.3 Analisis Pengaruh UMK Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil uji model *Random Effect*, diketahui jika UMK secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Koefisien UMK sebesar -0.490280 dan memiliki *slope* negatif. Artinya, jika terjadi kenaikan UMK sebesar 1%, maka penyerapan tenaga kerja akan turun

sebesar 0,4903%. Dari angka tersebut dapat diketahui jika UMK bersifat inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Hal ini dikarenakan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi. Jika upah minimum di suatu wilayah mengalami kenaikan, maka biaya produksi di perusahaan yang ada di wilayah tersebut juga akan meningkat. Sehingga untuk mengurangi biaya produksinya, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya atau bahkan merelokasi perusahaan nya. Selain itu, adanya kesenjangan upah minimum di suatu wilayah juga dapat mengakibatkan perusahaan yang ada di wilayah tersebut merelokasi usaha nya.

Sementara itu, dari hasil estimasi, didapatkan koefisien konstanta sebesar -4,205007. Artinya jika Investasi, PDRB Riil, dan UMK bernilai nol (0) maka penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat akan turun sebesar 4,2050%.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Investasi, PDRB Riil dan UMK sebagai variabel independen terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Secara simultan, penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dipengaruhi oleh Investasi, Produk Domestik Regional Bruto (Riil) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
2. Investasi secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat meskipun berpengaruh positif. Hal tersebut dikarenakan investasi yang masuk di Jawa Barat bersifat padat modal, sehingga kenaikan investasi tidak banyak memengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.
3. Pendapatan Domestik Regional Bruto memiliki pengaruh yang positif signifikan dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Barat. Tingginya nilai PDRB mengindikasikan jika barang akhir yang diproduksi di wilayah tersebut juga tinggi sehingga akan meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh negatif signifikan dan inelastis terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan upah yang merupakan salah satu komponen biaya produksi, sehingga apabila upah minimum meningkat maka biaya produksi suatu perusahaan juga akan meningkat sehingga perusahaan akan cenderung mengurangi tenaganya atau bahkan merelokasi perusahaannya.
5. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat bersifat Inelastis

6. Berdasarkan penelitian ini, faktor yang paling mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto dengan koefisien sebesar 0,787431.
7. Berdasarkan 27 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Kabupaten Bogor dan terendah adalah Kota Banjar. Investasi tertinggi ada di Kabupaten Bekasi dan Investasi terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya. PDRB tertinggi juga berada di Kabupaten Bekasi, sementara PDRB terendah ada di Kota Banjar. Sementara untuk Upah Minimum, tertinggi ada di Kabupaten Karawang dan yang terendah adalah Kota Banjar.

5.2 Implikasi

1. Untuk mengurangi pengangguran di Jawa Barat, dapat dilakukan dengan lebih banyak menarik Investasi yang berorientasi dalam padat karya, atau dengan meningkatkan keahlian masyarakat agar bisa mengimbangi investasi padat modal yang sudah ada.
2. Target Investasi di Jawa Barat harus jelas. Apakah investasi ditujukan untuk kesejahteraan seperti mengentaskan pengangguran atau hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi. Selain itu perlu adanya pemerataan investasi di Jawa Barat, agar tidak hanya terfokus pada beberapa daerah saja.
3. Kabupaten/Kota dengan tingkat upah minimum yang masih rendah dapat meningkatkan besaran upah minimumnya dengan tetap mempertimbangkan perusahaan marjinal. Hal tersebut agar tidak terjadi kesenjangan upah minimum yang yang terlalu besar antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
4. Meningkatkan PDRB di sektor manufaktur, terutama di sektor industri manufaktur tekstil ataupun UMKM agar bisa menyerap banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, M. T. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Ayumi, L. (2020). *Profil Pajak Kabupaten Bekasi*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/begini-profil-pajak-daerah-kawasan-industri-terbesar-di-asia-tenggara-20208>
- Biro Hukum dan Ham. (2019). *Surat Keputusan Gubernur*. <https://jdih.jabarprov.go.id/>
- BPS. (2016). *PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha*. <https://jabar.bps.go.id/subject/52/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html#subjekViewTab3>
- BPS. (2019). *Jumlah Tenaga Kerja Jawa Barat, 2010-2019*. <https://jabar.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab3>
- BPS. (2019). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/96138ece33ccc220007acbd/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2019.html>
- BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 1994- 2020*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2020). *Laju PDRB Atas Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota, 2011- 2019*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/155/48/1/laju-pdrb-atas-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, 1986-2019*. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/19/1774/tingkat->

[pengangguran-terbuka-tpt-menurut-provinsi-1986---2019.html](#)

- Budiarto, A., & Dewi, M. H. U. (2015). *Pengaruh Pdrb Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali*. *E-Jurnal EP Unud*, 4(10), 1219–1246.
- Diskominfo Jawa Barat. (2020). *Realisasi Investasi Provinsi Jawa Barat*. <https://data.jabarprov.go.id/visualization/realisasi-investasi-jawa-barat-tahun-2019>
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Indonesia*. UPP STIM YKPN.
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia* (1st ed.). UPP STIM YKPN.
- Feriyanto, N., & Sriyana, J. (2016). *Labor absorption under minimum wage policy in Indonesia*. *Regional Science Inquiry*, VIII(1), 11–21. https://www.researchgate.net/publication/307509936_Labor_absorption_under_minimum_wage_policy_in_Indonesia
- Hayyu, A. D. (2015). *Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2014* [UII]. <https://dspace.uii.ac.id/>
- Hizbullah, I. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2011-2015* [Universitas Islam Indonesia]. In *Ilmu Ekonomi*. <https://dspace.uii.ac.id/>
- Nasution, M. (1994). *Manajemen Personalia: Aplikasi dalam Perusahaan*. Djambatan.
- Pangastuti, Y. (2015). *Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah*. *Economics Development Analysis Journal*, 4, 203–211.
- Permenaker. (2005). *Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian*

- Kebutuhan Hidup Layak.*
https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/peraturan_file_141.pdf
- Permenaker. (2012). *Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.*
- Rosyidi, S. (2005). *Pengantar Teori-Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro.* PT Rajawali Grafindo Persada.
- Salvatore, D. (2014). *Ekonomi International* (9th ed.). Salemba Empat.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2011). *Mikro Ekonomi* (Y. Sumiharti (ed.); 14th ed.). Erlangga.
- Sari, K. N. (2018). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat* [Universitas Islam Indonesia].
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9181>
- Setiawan, M. H. (2017). *Perspektif Ekonomi Islam Tentang Peran Pemerintah dalam Penentuan Upah Pekerja Informal (Studi di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)* [UIN Raden Intan].
<http://repository.radenintan.ac.id/1233/>
- Simanjuntak, P. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.* LPFE UI.
- Sukirno, S. (2009). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). PT Rajawali Grafindo Persada.
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia (Teori dan Kebijakan Publik).* Graha Ilmu.
- Suyatno, T. (2003). *Dasar-Dasar Perkreditan* (4th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M. P. (1998). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (2nd ed.). Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Pembangunan Ekonomi* (12th ed.).

Erlangga.

Undang-Undang No.13, Pasal 1 Ayat 2 tentang Ketenaga Kerjaan.

<https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/64764/71554/F1102622842/I DN64764.pdf>

Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews* (5th ed.). UPP STIM YKPN.

Wihastuti, L., & Rahmatullah, H. (2018). Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa. *Gama Societa UGM*, 1(2), 96–102.



LAMPIRAN 1

DATA PENELITIAN

Kab/Kota	Tahun	Orang Bekerja	Investasi	PDRB Riil	UMK
Bogor	2015	2,083,234	8,707,528,531,488	124,486,980,000,000	2,590,000
Bogor	2016	2,217,494	7,828,480,512,591	131,760,370,000,000	2,960,325
Bogor	2017	2,351,753	6,395,725,363,556	139,561,450,000,000	3,204,552
Bogor	2018	2,356,875	8,687,961,331,137	148,204,830,000,000	3,483,667
Bogor	2019	2,538,637	9,180,854,686,960	156,869,704,110,000	3,763,406
Sukabumi	2015	912,272	4,939,175,032,527	37,265,250,000,000	1,940,000
Sukabumi	2016	974,902	1,066,008,137,131	39,447,010,000,000	2,195,435
Sukabumi	2017	1,037,532	497,723,833,637	41,692,620,000,000	2,376,558
Sukabumi	2018	1,027,606	965,996,787,285	44,107,870,000,000	2,583,557
Sukabumi	2019	1,031,213	585,190,734,363	46,668,620,330,000	2,791,016
Cianjur	2015	863,592	712,698,550,000	25,352,130,000,000	1,600,000
Cianjur	2016	854,925	1,587,644,944,169	26,981,370,000,000	1,837,520
Cianjur	2017	846,258	681,259,340,000	28,524,430,000,000	1,989,115
Cianjur	2018	881,180	184,326,331,297	30,302,880,000,000	2,162,367
Cianjur	2019	976,058	987,653,883,191	31,974,682,250,000	2,336,005
Bandung	2015	1,438,365	941,232,553,492	64,701,520,000,000	2,001,195
Bandung	2016	1,511,378	861,518,734,112	68,804,850,000,000	2,275,715
Bandung	2017	1,584,391	3,157,513,292,376	73,039,450,000,000	2,463,461
Bandung	2018	1,575,661	3,134,972,092,730	77,603,120,000,000	2,678,029
Bandung	2019	1,688,206	5,259,534,592,471	82,336,632,900,000	2,893,075
Garut	2015	945,768	237,422,400,000	31,919,060,000,000	1,250,000
Garut	2016	994,953	333,631,191,916	33,803,540,000,000	1,421,625
Garut	2017	1,044,137	2,074,742,773,865	35,464,910,000,000	1,538,909
Garut	2018	1,018,544	286,990,976,615	37,224,180,000,000	1,672,948
Garut	2019	1,071,026	776,108,683,947	39,092,646,890,000	1,807,286
Tasikmalaya	2015	724,664	6,947,500,000	19,662,490,000,000	1,435,000
Tasikmalaya	2016	743,399	5,013,733,217	20,824,800,000,000	1,632,360
Tasikmalaya	2017	762,133	48,639,320,000	22,063,290,000,000	1,776,686
Tasikmalaya	2018	774,131	73,866,160,629	23,319,640,000,000	1,920,938
Tasikmalaya	2019	813,411	NA	24,586,988,470,000	2,075,189
Ciamis	2015	494,078	131,871,877,290	17,779,910,000,000	1,131,862
Ciamis	2016	548,101	40,946,918,000	18,844,970,000,000	1,363,319
Ciamis	2017	602,123	53,214,097,058	19,826,750,000,000	1,475,793
Ciamis	2018	583,910	249,559,965	20,904,750,000,000	1,604,334
Ciamis	2019	593,039	NA	22,028,877,240,000	1,733,162

Kuningan	2015	435,712	5,641,250,000	13,175,670,000,000	1,206,000
Kuningan	2016	430,706	59,447,913,525	13,977,770,000,000	1,364,760
Kuningan	2017	425,700	158,328,673,940	14,866,620,000,000	1,477,353
Kuningan	2018	432,549	103,294,435,715	15,821,950,000,000	1,606,030
Kuningan	2019	453,781	5,267,000,000	16,860,516,960,000	1,734,994
Cirebon	2015	813,824	426,024,047,529	27,596,250,000,000	1,400,000
Cirebon	2016	847,316	1,616,489,944,598	29,149,310,000,000	1,592,220
Cirebon	2017	880,807	4,899,633,740,179	30,623,310,000,000	1,723,578
Cirebon	2018	890,762	4,812,689,552,206	32,160,190,000,000	1,873,702
Cirebon	2019	955,506	8,978,364,542,671	33,723,897,180,000	2,024,160
Majalengka	2015	580,729	386,421,293,088	16,590,930,000,000	1,245,000
Majalengka	2016	574,991	131,391,403,339	17,591,790,000,000	1,409,360
Majalengka	2017	569,252	3,595,069,491,833	18,789,490,000,000	1,525,632
Majalengka	2018	572,120	5,547,512,815,162	19,931,780,000,000	1,653,515
Majalengka	2019	600,450	1,042,593,698,930	21,358,916,540,000	1,791,693
Sumedang	2015	481,029	1,104,615,977,474	18,950,360,000,000	2,001,195
Sumedang	2016	493,428	581,362,409,009	20,029,720,000,000	2,275,715
Sumedang	2017	505,827	4,240,950,296,308	21,276,700,000,000	2,463,461
Sumedang	2018	507,378	1,106,170,053,744	22,517,160,000,000	2,678,029
Sumedang	2019	526,229	1,229,442,500,211	23,939,288,720,000	2,893,075
Indramayu	2015	677,201	903,076,250,000	56,663,300,000,000	1,465,000
Indramayu	2016	711,611	17,265,642,985	56,706,180,000,000	1,665,810
Indramayu	2017	746,020	384,932,842,279	57,515,010,000,000	1,803,239
Indramayu	2018	776,017	226,536,182,570	58,238,910,000,000	1,960,301
Indramayu	2019	818,449	1,500,245,339,784	60,154,352,200,000	2,117,714
Subang	2015	633,116	2,532,669,668,356	23,696,760,000,000	1,900,000
Subang	2016	678,712	907,810,970,901	24,976,920,000,000	2,149,720
Subang	2017	724,308	1,191,705,015,340	26,250,850,000,000	2,327,072
Subang	2018	711,978	1,544,283,034,345	27,412,660,000,000	2,529,759
Subang	2019	762,065	2,462,340,391,278	28,572,443,610,000	2,732,900
Purwakarta	2015	371,543	5,336,199,690,452	37,899,020,000,000	2,600,000
Purwakarta	2016	382,145	3,966,332,363,639	40,169,900,000,000	2,927,990
Purwakarta	2017	392,747	4,072,625,560,306	42,229,760,000,000	3,169,549
Purwakarta	2018	395,512	6,172,779,947,035	44,340,410,000,000	3,445,617
Purwakarta	2019	406,779	6,226,744,759,521	46,287,984,380,000	3,722,300
Karawang	2015	873,995	23,998,570,300,190	132,453,570,000,000	2,957,450
Karawang	2016	942,412	23,419,673,291,156	141,125,540,000,000	3,330,505
Karawang	2017	1,010,828	28,994,915,526,064	149,530,940,000,000	3,605,272
Karawang	2018	1,026,586	14,835,316,008,199	159,186,820,000,000	3,919,291
Karawang	2019	1,013,472	24,296,574,560,737	163,745,564,950,000	4,234,010
Bekasi	2015	1,344,821	33,130,528,865,603	205,950,390,000,000	2,840,000

Bekasi	2016	1,372,282	48,800,155,237,192	215,928,360,000,000	3,261,375
Bekasi	2017	1,399,743	32,626,277,756,702	228,178,920,000,000	3,530,438
Bekasi	2018	1,472,432	54,057,620,148,412	242,023,290,000,000	3,837,940
Bekasi	2019	1,619,175	47,359,388,550,601	252,051,029,190,000	4,146,126
Bandung Barat	2015	563,252	467,767,625,639	25,486,170,000,000	2,004,637
Bandung Barat	2016	617,550	971,614,620,589	26,925,880,000,000	2,280,175
Bandung Barat	2017	671,847	1,025,244,011,125	28,330,020,000,000	2,468,289
Bandung Barat	2018	683,877	813,613,526,334	29,888,890,000,000	2,683,277
Bandung Barat	2019	704,266	4,124,276,389,299	31,398,351,990,000	2,898,745
Pangandaran	2015	192,391	135,123,500,000	6,271,100,000,000	1,165,000
Pangandaran	2016	213,976	269,331,393,391	6,602,730,000,000	1,324,620
Pangandaran	2017	235,561	528,540,864,250	6,939,640,000,000	1,433,901
Pangandaran	2018	231,582	27,559,997,675	7,315,300,000,000	1,558,794
Pangandaran	2019	223,517	100,500,014	7,750,924,240,000	1,714,673
Kota Bogor	2015	400,983	280,115,818,957	25,298,600,000,000	2,658,155
Kota Bogor	2016	424,685	715,608,398,093	27,002,250,000,000	3,022,765
Kota Bogor	2017	448,386	5,187,390,018,903	28,654,970,000,000	3,272,143
Kota Bogor	2018	471,775	3,103,415,375,523	30,413,570,000,000	3,557,147
Kota Bogor	2019	486,867	2,383,580,295,410	32,250,502,080,000	3,842,786
Kota Sukabumi	2015	133,746	75,607,500,000	6,985,330,000,000	1,572,000
Kota Sukabumi	2016	132,328	10,917,063,403	7,379,480,000,000	1,834,175
Kota Sukabumi	2017	130,909	1,691,200,000	7,780,420,000,000	1,985,494
Kota Sukabumi	2018	132,848	929,959,961	8,208,780,000,000	2,158,431
Kota Sukabumi	2019	140,827	46,990,298,397	8,659,534,250,000	2,331,753
Kota Bandung	2015	1,084,989	11,986,714,995,203	149,580,380,000,000	2,310,000
Kota Bandung	2016	1,100,759	7,169,244,421,518	161,227,830,000,000	2,626,940
Kota Bandung	2017	1,116,529	2,077,222,156,525	172,851,960,000,000	2,843,663
Kota Bandung	2018	1,107,986	2,397,653,008,221	185,084,180,000,000	3,091,346
Kota Bandung	2019	1,183,193	6,310,285,825,661	197,642,705,130,000	3,339,581
Kota Cirebon	2015	126,821	154,208,750,000	13,269,240,000,000	1,415,000
Kota Cirebon	2016	134,534	192,706,493,551	14,077,050,000,000	1,608,945
Kota Cirebon	2017	142,246	290,295,794,435	14,893,140,000,000	1,741,683
Kota Cirebon	2018	148,033	561,948,538,275	15,817,430,000,000	1,893,384
Kota Cirebon	2019	138,667	10,374,699,219	16,812,908,000,000	2,045,422
Kota Bekasi	2015	1,081,936	842,859,850,002	55,456,070,000,000	2,954,031
Kota Bekasi	2016	1,174,314	3,262,471,942,837	58,831,080,000,000	3,327,160
Kota Bekasi	2017	1,266,692	3,833,261,988,673	62,202,010,000,000	3,601,650
Kota Bekasi	2018	1,325,953	6,372,571,418,787	65,844,240,000,000	3,915,354
Kota Bekasi	2019	1,383,287	7,240,583,700,991	69,404,619,530,000	4,229,757
Kota Depok	2015	896,981	567,760,050,000	37,529,480,000,000	2,705,000
Kota Depok	2016	953,191	713,022,928,598	40,263,230,000,000	3,046,180

Kota Depok	2017	1,009,401	1,078,358,110,410	42,939,380,000,000	3,297,489
Kota Depok	2018	1,028,292	1,727,293,100,925	45,870,490,000,000	3,584,700
Kota Depok	2019	1,112,358	6,164,958,480,781	49,076,626,470,000	3,872,552
Kota Cimahi	2015	257,105	252,951,550,000	17,876,440,000,000	2,001,200
Kota Cimahi	2016	264,561	1,087,268,214,934	18,882,160,000,000	2,275,715
Kota Cimahi	2017	272,017	365,587,180,408	19,907,130,000,000	2,463,461
Kota Cimahi	2018	273,955	174,235,679,030	21,038,450,000,000	2,678,028
Kota Cimahi	2019	272,553	1,326,167,109,385	22,641,829,270,000	2,893,074
Kota Tasikmalaya	2015	301,406	10,056,250,000	12,370,620,000,000	1,450,000
Kota Tasikmalaya	2016	295,901	43,184,150,625	13,225,250,000,000	1,641,280
Kota Tasikmalaya	2017	290,396	124,116,376,077	14,027,800,000,000	1,776,686
Kota Tasikmalaya	2018	287,233	43,585,300,000	14,861,530,000,000	1,931,435
Kota Tasikmalaya	2019	301,081	2,219,600,000	15,746,106,690,000	2,086,530
Kota Banjar	2015	77,929	1,286,509,068,212	2,624,240,000,000	1,168,000
Kota Banjar	2016	80,981	1,363,733,886,473	2,772,840,000,000	1,327,965
Kota Banjar	2017	84,032	628,261,404	2,918,870,000,000	1,437,522
Kota Banjar	2018	85,113	1,684,609,413,240	3,066,880,000,000	1,562,730
Kota Banjar	2019	88,846	NA	3,220,752,970,000	1,688,218

Keterangan :

Orang Bekerja : Satuan Jiwa

Investasi : Satuan Rupiah

PDRB Riil : Satuan Rupiah

UMK : Satuan Rupiah

LAMPIRAN 2

OLAH DATA EVIEWS

Common Effect

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/17/20 Time: 22:26
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (unbalanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.205007	1.702083	-2.470507	0.0148
LOG(INVESTASI)	0.006417	0.019140	0.335260	0.7380
LOG(PDRB)	0.787431	0.055705	14.13585	0.0000
LOG(UMK)	-0.490280	0.148227	-3.307640	0.0012
R-squared	0.741872	Mean dependent var		13.28670
Adjusted R-squared	0.735822	S.D. dependent var		0.783063
S.E. of regression	0.402481	Akaike info criterion		1.047494
Sum squared resid	20.73479	Schwarz criterion		1.134852
Log likelihood	-65.13462	Hannan-Quinn criter.		1.082992
F-statistic	122.6262	Durbin-Watson stat		0.017844
Prob(F-statistic)	0.000000			

Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/17/20 Time: 22:23
 Sample: 2015 2019
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 27
 Total panel (unbalanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.032389	1.909128	-1.588363	0.1148
LOG(INVESTASI)	0.011543	0.019662	0.587071	0.5582
LOG(PDRB)	0.800922	0.056902	14.07558	0.0000
LOG(UMK)	-0.608827	0.171176	-3.556742	0.0005

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.746158	Mean dependent var	13.28670
Adjusted R-squared	0.731828	S.D. dependent var	0.783063

S.E. of regression	0.405512	Akaike info criterion	1.091358
Sum squared resid	20.39053	Schwarz criterion	1.266073
Log likelihood	-64.02961	Hannan-Quinn criter.	1.162354
F-statistic	52.07042	Durbin-Watson stat	0.009442
Prob(F-statistic)	0.000000		

Random Effect

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel EGLS (Period random effects)

Date: 11/17/20 Time: 22:27

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (unbalanced) observations: 132

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.205007	1.714902	-2.452040	0.0156
LOG(INVESTASI)	0.006417	0.019284	0.332754	0.7399
LOG(PDRB)	0.787431	0.056124	14.03019	0.0000
LOG(UMK)	-0.490280	0.149343	-3.282916	0.0013

Effects Specification

	S.D.	Rho
Period random	0.000000	0.0000
Idiosyncratic random	0.405512	1.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.741872	Mean dependent var	13.28670
Adjusted R-squared	0.735822	S.D. dependent var	0.783063
S.E. of regression	0.402481	Sum squared resid	20.73479
F-statistic	122.6262	Durbin-Watson stat	0.017844
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.741872	Mean dependent var	13.28670
Sum squared resid	20.73479	Durbin-Watson stat	0.017844

LAMPIRAN 3

UJI PANEL EVIEWS

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM2

Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	0.523390	(4,124)	0.7187
Period Chi-square	2.210024	4	0.6972

Period fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/20 Time: 16:55

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (unbalanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.205007	1.702083	-2.470507	0.0148
LOG(INVESTASI)	0.006417	0.019140	0.335260	0.7380
LOG(PDRB)	0.787431	0.055705	14.13585	0.0000
LOG(UMK)	-0.490280	0.148227	-3.307640	0.0012
R-squared	0.741872	Mean dependent var		13.28670
Adjusted R-squared	0.735822	S.D. dependent var		0.783063
S.E. of regression	0.402481	Akaike info criterion		1.047494
Sum squared resid	20.73479	Schwarz criterion		1.134852
Log likelihood	-65.13462	Hannan-Quinn criter.		1.082992
F-statistic	122.6262	Durbin-Watson stat		0.017844
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM2

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	2.079268	3	0.5561

Period random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOG(INVESTASI)	0.011543	0.006417	0.000015	0.1813
LOG(PDRB)	0.800922	0.787431	0.000088	0.1501
LOG(UMK)	-0.608827	-0.490280	0.006998	0.1564

Period random effects test equation:

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 11/29/20 Time: 16:56

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 27

Total panel (unbalanced) observations: 132

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.032389	1.909128	-1.588363	0.1148
LOG(INVESTASI)	0.011543	0.019662	0.587071	0.5582
LOG(PDRB)	0.800922	0.056902	14.07558	0.0000
LOG(UMK)	-0.608827	0.171176	-3.556742	0.0005

Effects Specification

Period fixed (dummy variables)

R-squared	0.746158	Mean dependent var	13.28670
Adjusted R-squared	0.731828	S.D. dependent var	0.783063
S.E. of regression	0.405512	Akaike info criterion	1.091358
Sum squared resid	20.39053	Schwarz criterion	1.266073
Log likelihood	-64.02961	Hannan-Quinn criter.	1.162354
F-statistic	52.07042	Durbin-Watson stat	0.009442
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	248.1266 (0.0000)	1.156476 (0.2822)	249.2831 (0.0000)

Honda	15.75204 (0.0000)	-1.075396 --	10.37795 (0.0000)
King-Wu	15.75204 (0.0000)	-1.075396 --	4.746118 (0.0000)
Standardized Honda	16.74929 (0.0000)	-0.818919 --	7.733129 (0.0000)
Standardized King-Wu	16.74929 (0.0000)	-0.818919 --	2.586883 (0.0048)
Gourierioux, et al.*	--	--	248.1266 (< 0.01)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 الجامعة الإسلامية الاندونيسية